

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. BATASAN PENGERTIAN

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Kehakiman adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana<sup>1</sup>.

Sedangkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut ensiklopedi sebagai berikut<sup>2</sup> :

1. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
2. Pemasyarakatan (reklasering) adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Kehakiman, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman, bekas hukuman/bekas tahanan termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan sebagai terlibat, untuk kembali kemasyarakat.

Dengan demikian ditinjau dari segi bahasa Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan (organisasi) yang melakukan usaha memasyarakatkan orang-orang/warga masyarakat yang melakukan tindak pidana atau kenakalan yang bersifat sosial.

Berdasarkan Klasifikasi pelayanan Lembaga Pemasyarakatan, Kotamadya Yogyakarta mempunyai jenis pelayanannya klasifikasi klas II yaitu dengan jumlah narapidana 250-500 orang, sedangkan untuk tingkat pelayanannya adalah tingkat Kotamadya atau Kabupaten.

## 1.2. LATAR BELAKANG

### 1.2.1. Konsep Pemasyarakatan

Konsep pemasyarakatan lahir tanggal 27 April 1964<sup>3</sup>, sebagai hasil konferensi dinas

---

<sup>1</sup> Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pola Pembinaan Narapidana/tahanan, Cetakan I, tahun 1990.

<sup>2</sup> Reklasering, Ensiklopedi Indonesia, Jilid V, hal 2874.

<sup>3</sup> Dari Sangkar Ke Sanggar, Suddjono Dirdjo Sisworo, Hal 17.

Direktorat Pemasyarakatan di Lembang. Adapun unsur-unsur dari konsep pemasyarakatan meliputi <sup>4</sup>:

1. Orang yang tersesat perlu diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat. Untuk mengayomi manusia yang tersesat maka diperlukan suatu ruang pembinaan dan pendidikan agar kembali kemasyarakat dapat menjadi warga yang baik.
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam.
3. Satu-satunya derita yang dialami hendaknya dihilangkan kemerdekaan. Cara perawatan dan penempatan bagi narapidana hendaknya memberikan suasana ruang yang tidak menekan dan manusiawi, tidak jauh berbeda dengan suasana yang ada di masyarakat.
4. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan maka diperlukan ruang-ruang yang berfungsi sebagai tempat beribadat.
5. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat dari pada sebelum masuk penjara. Diperlukannya pengelompokan ruang sesuai dengan klasifikasi kejahatannya.
6. Masih adanya segala bentuk "label" yang negatif seperti :
  - a. Bentuk dan warna gedung yang kurang serasi.
  - b. Cara pemberian perawatan dan penempatan.

Kesimpulan:

Dari unsur-unsur yang ada, sebuah Lembaga Pemasyarakatan akibat dari timbulnya konsep pemasyarakatan, merupakan suatu kombinasi antara ruang gerak yang sehat dimana sekelompok manusia menjalani sebagian kehidupannya, dengan faktor sekuriti yang harus tetap dipertahankan sebagai pencerminan unsur punishment yang dikenakan kepada penghuninya.

#### 1.2.2. Kondisi Faktual Lembaga Pemasyarakatan Kotamadya Yogyakarta

Kotamadya Yogyakarta saat ini terdapat sebuah lembaga pemasyarakatan peninggalan

---

<sup>4</sup> Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan, Hal 57, Bina Cipta, Jakarta, 1975.

jaman Belanda yang kondisi fisik bangunanya sudah tidak mendukung konsep pemasyarakatan. Kondisi fisik yang sudah tidak mendukung konsep pemasyarakatan antara lain : Ruang dalam dan ruang luar.

Ruang dalam berupa kebutuhan ruang (susunan, besaran ruang, jenis dan perlengkapan ruang) dan suasana ruang pada Lembaga Pemasyarakatan Kotamadya Yogyakarta.

Sedangkan ruang luar yaitu berupa penampilan bangunan. Untuk memenuhi wadah yang sesuai dan mendukung konsep pemasyarakatan maka Lembaga Pemasyarakatan Kotamadya Yogyakarta mempunyai beberapa gambaran meliputi :

1. Gambaran akan kebutuhan ruang

Kebutuhan ruang pada Lembaga Pemasyarakatan Kotamadya Yogyakarta sudah tidak mendukung konsep pemasyarakatan. Hal ini disebabkan masih tercampur baurnya ruang antara narapidana berat (maksimum sekuriti) berupa pembunuhan, pemerkosaan yang sadistis dicampur dengan pidana sedang (medium sekuriti) berupa perampokan dan pencurian. Sedangkan pidana sedang (medium sekuriti) dicampur dengan pidana rendah (minimum sekuriti) berupa pencurian yang hukumannya dibawah 1 tahun. Dari campur baurnya narapidana akan menimbulkan perilaku yang kurang baik setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tersebut. Agar narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan membawa perilaku yang baik ke masyarakat, maka perlu penempatan ruang yang sesuai dengan klasifikasi kejahatannya.

2. Gambaran akan suasana ruang narapidana yang mendukung konsep pemasyarakatan

Satu hal pokok yang tidak diperoleh dalam mewujudkan sosok Lembaga Pemasyarakatan yang manusiawi adalah menyangkut usaha pemenuhan kebutuhan rohani. Menurut sejumlah narapidana masalah batiniah merupakan masalah yang menyiksa dalam penjara. Mereka merasa ketakutan dalam ruangan tersebut. Menurut Woringer, ketakutan dalam ruang menimbulkan dorongan terhadap abstraksi. Abstraksi merupakan hasil dari ketakutan



spiritual manusia yang sangat besar terhadap ruang<sup>5</sup>. Hal-hal yang menghantui ketakutan mereka tercermin dalam suasana ruang yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut meliputi :

- a. Fasilitas hunian kurang memenuhi standart ruang.
- b. Kurangnya sistem pencahayaan dan penghawaan serta sempitnya ruang gerak.
- c. Kurangnya ruang terbuka yang berfungsi sebagai fasilitas olah raga dan rekreasi.

Untuk mendidik dan membina narapidana diperlukan suatu ruang dengan suasana yang tidak menekan, manusiawi serta tidak terlalu jauh berbeda dengan suasana yang ada dimasyarakat sehingga dapat mendukung konsep pemasyarakatan.

3. Gambaran penampilan bangunan yang mendukung konsep pemasyarakatan. Sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan peninggalan Belanda bentuk penampilan bangunannya berkesan angker/menakutkan. Hal ini tercermin pada tembok yang tinggi dan kokoh, serta ukuran pintu gerbang yang tinggi. Sehingga manusia yang memandang dari luar mempunyai kesan bahwa Lembaga Pemasyarakatan tersebut merupakan suatu tempat penyiksaan bagi manusia yang jahat. Agar tidak menimbulkan kesan sebagai tempat penyiksaan dan angker maka diperlukan suatu penampilan bangunan yang mendukung konsep pemasyarakatan. Untuk menampilkan suatu bangunan maka diperlukan suatu citra (image) tertentu untuk bangunan tersebut.

### 1.3. RUMUSAN PERMASALAHAN

#### 1. Permasalahan Umum

Bagaimana mewujudkan susunan, besaran, jenis serta perlengkapan ruang baik ruang dalam maupun ruang luar untuk memenuhi kebutuhan pada Lembaga Pemasyarakatan Kotamadya Yogyakarta.

#### 2. Permasalahan Khusus

---

<sup>5</sup> Cornelir Van De Ven, Hal 117, Tahun 1990

Bagaimana menciptakan suasana ruang dalam maupun luar serta penampilan bangunan yang mendukung konsep pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kotamadya Yogyakarta.

#### 1.4. TUJUAN DAN SASARAN

**TUJUAN :** Merumuskan landasan konseptual perencanaan dan perancangan terhadap Lembaga Pemasyarakatan Kotamadya Yogyakarta dengan penekanan suasana ruang serta penampilan bangunan yang mendukung konsep pemasyarakatan.

**SASARAN :** Memecahkan masalah yang ada pada rumusan permasalahan untuk mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan meliputi :

1. Ruang dalam maupun luar (susunan, besaran, jenis serta perlengkapan ruang) yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kotamadya Yogyakarta yang mendukung konsep pemasyarakatan.
2. Suasana ruang yang tidak menekan dan manusiawi serta penampilan bangunan yang keduanya mendukung konsep pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kotamadya Yogyakarta.

#### 1.5. LINGKUP PEMBAHASAN

Pembahasan dibatasi pada masalah-masalah yang menghasilkan faktor-faktor penentu perencanaan dan perancangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kotamadya Yogyakarta yang berorientasi pada :

1. Lingkup konsep pemasyarakatan narapidana di L P Kotamadya Yogyakarta.
2. Kebutuhan ruang dalam maupun luar pada L P Kotamadya Yogyakarta.
3. Menciptakan suasana ruang dalam maupun luar serta penampilan bangunan yang mendukung konsep pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kotamadya Yogyakarta.

Hal-hal diluar disiplin arsitektur, akan dibahas bila mendasari faktor-faktor perencanaan dan perancangan dengan memakai asumsi dan logika.

## 1.6. METODE PEMBAHASAN

Metode pembahasan dilakukan secara induktif yaitu, menarik kesimpulan dari hasil observasi dan pengamatan, dengan tahapan pembahasan sebagai berikut:

### 1.6.1. Tahap pengumpulan data

Pengumpulan data dan informasi yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang berupa hasil pengamatan lapangan dan wawancara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan meliputi : Konsep pemasyarakatan, tuntutan kebutuhan di Lembaga Pemasyarakatan kotamadya Yogyakarta berupa ruang dalam maupun ruang luar (susunan, besaran, jenis serta perlengkapan ruang), suasana ruang baik dalam maupun luar serta penampilan bangunan di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Data sekunder yaitu segala bentuk yang tercatat, yang diperoleh dari studi literatur dan data fisik lapangan serta instansi yang terkait meliputi, konsep pemasyarakatan, standar ruang, suasana ruang (value of spaces), penampilan bangunan.

### 1.6.2. Tahap Analisa

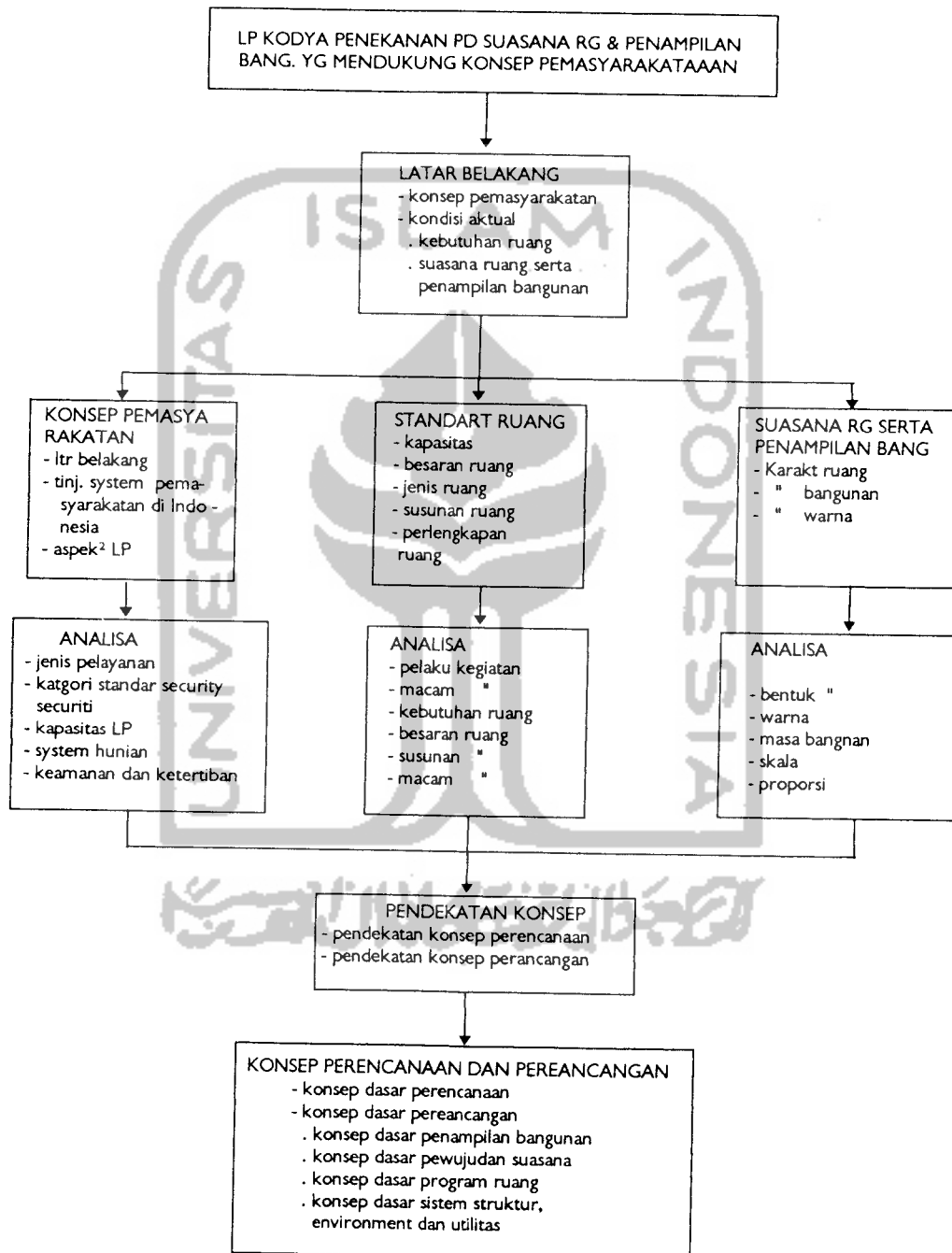
Analisis merupakan tahapan penguraian masalah dalam mengidentifikasi masalah berdasarkan data-data yang telah terkumpul dan analisis ini didasarkan pada landasan teori yang relevan dengan permasalahan. Analisis arsitektural mengenai konsep pemasyarakatan penerapannya pada standart ruang, suasana ruang serta penampilan bangunan pada Lembaga Pemasyarakatan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan mengenai kondisi sekarang.

### 1.6.3. Tahap Sintesis

Hasil dari tahap analisa disusun dengan kerangka yang terarah dan terpadu berupa deskripsi konsep perancangan sebagai pemecahan masalah.

#### 1.6.4. Diagram pola pikir

Diagram pola pikir merupakan arahan dalam menyusun bab-bab yang nantinya dapat membuat penulisan isi sesuai dengan diagram tersebut.



Gambar 1.1. Diagram Pola Pikir

## 1.7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, permasalahan umum dan khusus, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan, sistematika pembahasan serta keaslian penulisan.

Bab II Lembaga Pemasyarakatan Kodya Yogyakarta

- Meninjau Lembaga Pemasyarakatan meliputi: Sejarah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Konsepsi pemasyarakatan, aspek-aspek Lembaga Pemasyarakatan.
- Meninjau ruang dalam dan luar (susunan, besaran, jenis dan perlengkapan ruang) untuk memenuhi kebutuhan pada Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
- Meninjau suasana ruang dalam maupun luar serta penampilan bangunan.
- Kondisi site.

BAB III Aspek-aspek lembaga pemasyarakatan

- Menganalisa ruang dalam maupun luar (susunan, besaran, jenis dan perlengkapan ruang untuk memenuhi tuntutan kebutuhan di Lembaga pemasyarakatan Kotamadya Yogyakarta.
- Menganalisa suasana ruang baik ruang dalam maupun ruang luar serta penampilan bangunan yang mendukung konsep pemasyarakatan.
- Menganalisa kondisi site

BAB IV Pendekatan konsep meliputi:

- Pendekatan konsep perencanaan terdiri dari pendekatan penentuan lokasi, pendekatan penentuan site.
- Pendekatan konsep kearah perancangan terdiri dari pendekatan penampilan bangunan, pendekatan perwujudan suasana, pendekatan aktivitas dan sirkulasi, pendekatan kebutuhan ruang, pendekatan pola ruang dan besaran, pendekatan penzoningan, pendekatan gubahan masa, pendekatan struktur, enviroment dan utilitas.



## Bab V Konsep dasar perencanaan dan perancangan

- Konsep dasar perencanaan terdiri dari konsep dasar penentuan lokasi, konsep dasar penataan site, konsep dasar tata lingkungan, konsep dasar tata masa.
- Konsep dasar perancangan terdiri dari konsep dasar penampilan bangunan, konsep dasar perwujudan suasana, konsep dasar program ruang, konsep dasar organisasi ruang, konsep dasar sistem struktur, environment, utilitas.

### 1.8. KEASLIAN PENULISAN

Penulisan mengenai Lembaga Pemasarakatan banyak dilakukan, akan tetapi penekanan-penekannya berbeda. Penulisan-penulisan tersebut antara lain :

1. Lembaga Pemasarakatan Penekanannya Pada Pengadaan Fasilitas Kunjungan Khusus Dengan Tinjauan Privacy, Basuki, 14781/TA UGM penekanannya pada pengadaan fasilitas kunjungan dengan tinjauan privacy yang ditujukan untuk narapidana yang telah berkeluarga. Perbedaannya : Pengadaan fasilitas kunjungan dengan tinjauan privacy. Sedangkan dalam thesis ini perencanaan dan perancangan Lembaga Pemasarakatan Kotamadya Yogyakarta dengan menekankan pada suasana ruang serta penampilan bangunan yang mendukung konsep pemasarakatan.
2. Lembaga Pemasarakatan Narapidana Yogyakarta, Susinarindah 91113/TA UGM, penekannya pada wadah pembinaan dan pendidikan narapidana serta faktor keamanan dalam Lembaga Pemasarakatan Yogyakarta. Perbedaannya : Perencanaan dan perancangan bangunan menunjukan suatu wadah pembinaan dan pendidikan serta faktor keamanan dalam Lembaga Pemasarakatan narapidana Yogyakarta. Sedangkan dalam thesis ini penekanannya pada suasana ruang baik ruang dalam maupun luar serta penampilan bangunan.